

DAMPAK PERALIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA KETAPANG *URBAN AQUACULTURE* TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Bintang Kamila Maharani ^{1)*}, Laeli Nur Khanifah ²⁾

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

6670210068@untirta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak peralihan pengelolaan Desa Wisata Ketapang *Urban Aquaculture* terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan indikator AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integracy, Latency*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan pengelolaan Desa Wisata Ketapang Urban Aquaculture dari pemerintah ke BUMD PT. Mitra Kerta Raharja berdampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Analisis menggunakan teori AGIL Talcott Parsons mengungkapkan lemahnya *Adaptation, Goal Attainment, Integracy, Latency* akibat naiknya biaya, menurunnya wisatawan, terbatasnya partisipasi, serta pudarnya nilai lokal. Pengelolaan yang berorientasi korporat cenderung mengabaikan kesejahteraan warga dan memicu ketimpangan sosial ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam pengembangan desa wisata agar keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Kata kunci : Peralihan pengelolaan, Desa wisata, Sosial ekonomi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui prinsip ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Musdah & Nurdin, 2024). Pembangunan daerah juga diarahkan

hingga ke tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan negara. Dalam konteks ini, desa juga memiliki hak untuk mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Prabowo, 2020).

Salah satu potensi strategis yang dapat dikembangkan oleh desa-desa di

Indonesia adalah sektor pariwisata. Berbeda dengan pariwisata konvensional yang berpusat di kawasan perkotaan atau destinasi terkenal, pariwisata berbasis desa menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan unik, memanfaatkan potensi lokal seperti alam, budaya, dan kearifan masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata desa tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan PADes, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota (Parhad, 2020). Salah satu contoh pengembangan pariwisata desa yang menarik untuk dikaji adalah Desa Ketapang di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Wilayah pesisir ini pada awalnya merupakan kawasan kumuh dengan infrastruktur terbatas, pendapatan masyarakat yang rendah, lapangan kerja yang minim, dan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi (Puro et al., 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pesisir melalui pendekatan ekowisata berbasis konservasi. Melalui program tersebut, Desa Ketapang kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata bernama Ketapang Urban Aquaculture (KUA), yang menggabungkan potensi wisata bahari, konservasi mangrove, kegiatan edukatif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengembangan KUA didasarkan pada sejumlah kebijakan penting, seperti Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 050/Kep.380-HUK/2017 yang menetapkan wilayah kumuh di Kabupaten

Tangerang, termasuk Desa Ketapang, untuk ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2023 menempatkan Desa Ketapang sebagai bagian dari program pengembangan ekowisata dan peningkatan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga meluncurkan Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) sejak 2016 yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata berkelanjutan (Nishfatin, 2024).

Sejak pembangunan dimulai pada tahun 2016, kawasan Ketapang Urban Aquaculture mengalami transformasi signifikan. Pemerintah membangun infrastruktur dasar seperti jembatan kayu yang mengelilingi hutan mangrove, menyediakan fasilitas wisata seperti area parkir dan tempat makan, serta melakukan restorasi ekosistem melalui penanaman lebih dari 1,6 juta pohon mangrove dari 17 spesies. Kawasan tambak kosong yang sebelumnya tidak produktif berubah menjadi kawasan konservasi dan destinasi wisata. Program pemberdayaan masyarakat pun dijalankan, dengan melibatkan warga dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti penjualan makanan, minuman, dan kerajinan tangan. Langkah-langkah tersebut menjadikan Ketapang Urban Aquaculture sebagai contoh keberhasilan pengelolaan pesisir berkelanjutan di tingkat lokal (Pokhrel, 2024).

Keberhasilan tersebut bahkan

diakui secara internasional, ketika Desa Ketapang ditunjuk sebagai desa percontohan dalam ajang *Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments* pada tahun 2022 (Fitriana, 2023). Namun, dinamika pengelolaan kawasan ini berubah ketika pemerintah daerah memutuskan untuk mengalihkan pengelolaan Ketapang Urban Aquaculture dari pemerintah dan masyarakat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT. Mitra Kerta Raharja (MKR), pada tahun 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 69 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada PT. MKR untuk mengelola kawasan seluas 125 hektar, mencakup aspek keamanan, kebersihan, penataan, hingga pembangunan sarana prasarana pendukung. Peralihan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem manajemen yang lebih profesional, khususnya dalam hal pengelolaan retribusi dan pencegahan praktik pungutan liar yang sebelumnya kerap terjadi.

Namun, dalam implementasinya, alih kelola ini justru memunculkan berbagai persoalan baru. Salah satunya adalah perubahan kebijakan tiket masuk yang menjadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada penurunan jumlah pengunjung yang signifikan. Kondisi ini memicu efek terhadap sektor ekonomi lokal, di mana banyak pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa menutup usaha mereka (Napilah, 2022).

Selain itu, perubahan sistem pengelolaan juga menyebabkan

pengurangan tenaga kerja lokal. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di kawasan wisata harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi manajemen yang diterapkan oleh pihak BUMD. Penurunan jumlah pengunjung yang terus berlanjut membuat aliran pendapatan dari tiket dan retribusi tidak stabil, sehingga PT. MKR kesulitan melaksanakan rencana pengembangan fasilitas wisata seperti gondola, jalur sepeda, *homestay*, dan laboratorium mangrove. Keterbatasan dana juga diperburuk oleh tidak adanya dukungan finansial dari pemerintah daerah, meskipun peraturan menyebutkan bahwa perusahaan pengelola berhak mendapatkan subsidi dan penyertaan modal.

Dampak lain yang cukup signifikan adalah menurunnya kualitas infrastruktur kawasan. Observasi di lapangan menunjukkan adanya jembatan yang lapuk, fasilitas yang tidak terawat, dan kondisi lingkungan yang kembali kumuh. Penurunan kualitas pelayanan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari Tim Koordinasi Urban Aquaculture yang seharusnya memantau kinerja BUMD. Minimnya pengawasan membuat berbagai permasalahan yang muncul tidak mendapat penanganan secara cepat dan tepat.

Transformasi pengelolaan Ketapang Urban Aquaculture dari pemerintah ke BUMD yang awalnya diharapkan membawa dampak positif ternyata menimbulkan sejumlah konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penurunan jumlah wisatawan, berkurangnya peluang kerja, penurunan pendapatan UMKM, serta degradasi

fasilitas dan lingkungan menjadi realitas yang dihadapi masyarakat pasca peralihan pengelolaan.

Situasi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam tata kelola pariwisata berbasis masyarakat ketika pengelolaan berpindah ke tangan perusahaan daerah yang berorientasi pada profit. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peralihan pengelolaan Ketapang Urban Aquaculture memengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Ketapang. Penelitian ini berupaya menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi setelah alih kelola serta sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan desa wisata. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi kebijakan pengelolaan pariwisata berbasis BUMD terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Ketapang merupakan desa pesisir di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, dengan luas 4.169 km² dan populasi 11.072 jiwa yang mayoritas beragama Islam (99,65%). Kawasan ini berkembang menjadi Desa Wisata Ketapang Urban Aquaculture setelah mengalami transformasi dari pemukiman nelayan kumuh yang rawan abrasi menjadi destinasi ekowisata berbasis konservasi mangrove. Inisiatif penanaman

mangrove yang dimulai masyarakat pada 2016 kemudian dikembangkan menjadi program revitalisasi pemerintah daerah sejak 2019, dan diresmikan sebagai kawasan wisata pada 14 Januari 2023 di bawah pengelolaan PT Mitra Kerta Raharja.

Sebelum peralihan pengelolaan ke PT Mitra Kerta Raharja melalui Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022, kondisi sosial ekonomi masyarakat menunjukkan karakteristik yang sangat partisipatif dan inklusif. Sistem pengelolaan berbasis komunitas memberikan ruang luas bagi keterlibatan warga dalam seluruh aspek pengembangan kawasan wisata, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasional. Masyarakat tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan pelaku utama yang memiliki kontrol penuh terhadap proses pengembangan kawasan. Dinamika sosial yang terbangun menunjukkan kuatnya hubungan antarwarga melalui kegiatan kolektif seperti gotong royong, musyawarah, dan pelaksanaan tradisi budaya seperti Festival Nadran yang menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir. Karang Taruna berperan sebagai motor penggerak berbagai inisiatif lingkungan, terutama dalam gerakan penanaman dan pelestarian mangrove, menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan kawasan.

Dari aspek ekonomi, sistem pengelolaan partisipatif menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan inklusif. Masyarakat terlibat langsung dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti pengelolaan parkir, warung makanan, penyewaan fasilitas wisata, dan jasa

transportasi lokal, dengan kebijakan tarif yang sangat terjangkau bahkan gratis untuk akses masuk. Tingginya jumlah pengunjung, yang mencapai puncak 30.157 kunjungan pada April 2023, berdampak langsung pada peningkatan omzet UMKM lokal dengan pendapatan harian mencapai Rp300.000- Rp400.000. Sektor informal seperti pengelolaan parkir juga memberikan penghasilan mingguan Rp500.000- Rp700.000. Sistem ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga mendorong berkembangnya skala usaha dan membuka kesempatan kerja tambahan, menciptakan multiplier effect dalam perekonomian desa. Integrasi antara sektor primer dan pariwisata juga tampak jelas, dengan hasil laut masyarakat menjadi bagian dari atraksi edukasi wisata sekaligus mendapat pasar langsung dari wisatawan.

Proses peralihan pengelolaan dimulai dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada PT Mitra Kerta Raharja dalam Pengelolaan Kawasan Ketapang Urban Aquaculture, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 sebagai kerangka operasional. Peralihan ini mengakibatkan redistribusi peran dan kewenangan berbagai institusi, dengan BAPPEDA berposisi sebagai dewan pengawas dan pengarah perencanaan, sementara pengelolaan teknis dialihkan sepenuhnya kepada PT Mitra Kerta Raharja. Dinas Perikanan yang sebelumnya memiliki peran sentral dalam pengelolaan tambak mengalami marginalisasi dengan koordinasi yang sangat minim. Implementasi pengelolaan korporat mengakibatkan perubahan

signifikan dalam sistem tarif dari model subsidi menuju model komersial, dengan tiket masuk yang ditetapkan Rp15.000 per orang, menciptakan persepsi bahwa harga tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.

Dampak sosial pasca peralihan pengelolaan menunjukkan perubahan mendasar dalam struktur dan dinamika kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang sebelumnya bersifat langsung dan menyeluruh kini tereduksi menjadi terbatas dan simbolis. Warga hanya dilibatkan pada acara tertentu saja, bahkan untuk kegiatan keagamaan atau budaya di area wisata harus melalui mekanisme izin dari pengelola. Sistem komunikasi dan koordinasi sosial yang sebelumnya melalui kelembagaan lokal seperti RT atau RW kini diputus karena seluruh koordinasi langsung dilakukan oleh pengelola, menyebabkan fungsi kelembagaan lokal melemah dan fragmentasi sosial di tengah masyarakat. Tradisi budaya seperti Festival Nadran yang terakhir diselenggarakan pada 2022 tidak lagi diadakan, menandakan terjadinya erosi budaya lokal yang berdampak pada melemahnya rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Karang Taruna yang sebelumnya menjadi motor utama berbagai kegiatan sosial dan lingkungan kini nyaris tidak memiliki peran, menyebabkan pemuda kehilangan wadah untuk berpartisipasi dan melemahkan kapasitas mereka sebagai agen perubahan.

Transformasi ekonomi pasca peralihan pengelolaan menunjukkan penurunan drastis yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Jumlah pengunjung menurun signifikan, dengan

perbandingan kunjungan Januari 2023 sebanyak 13.505 menjadi hanya 6.495 pada Januari 2024, dan puncak kunjungan April 2023 sebesar 30.157 turun drastis menjadi 8.715 pada April 2024. Penurunan kunjungan ini berkorelasi langsung dengan penurunan pendapatan, dari Rp452.355.000 pada April 2023 menjadi hanya Rp130.725.000 pada April 2024. Kondisi ini diperparah dengan fasilitas yang tidak terawat dan kurang inovasi, menciptakan persepsi value for money yang negatif di kalangan pengunjung. Dampak langsung dirasakan pelaku UMKM dengan penurunan omzet harian dari Rp300.000- Rp400.000 menjadi hanya sekitar Rp100.000, bahkan sering mengalami kerugian. Banyak warung terpaksa tutup, dan masyarakat beralih mencari pekerjaan serabutan di luar desa. Akses masyarakat terhadap sumber penghidupan di kawasan wisata berkurang drastis, dengan pengelolaan parkir dan sektor informal lainnya yang sebelumnya dikelola masyarakat kini diambil alih pengelola.

Dari sisi ketenagakerjaan formal, jumlah pegawai menyusut dari 37 orang menjadi hanya 20 orang, dengan hari kerja dikurangi dari 20 hari menjadi 12 hari per bulan karena keterbatasan anggaran operasional. Sistem pengelolaan baru menerapkan pola manajerial dengan struktur organisasi yang lebih formal dan birokratis, namun ketergantungan pada persetujuan pemerintah daerah dalam setiap kebijakan pengembangan memperlambat proses inovasi. Meskipun pengelola mengklaim tetap memberdayakan masyarakat lokal, keterlibatan warga terbatas hanya pada level operasional tanpa ruang partisipasi

dalam pengambilan keputusan atau perencanaan pengelolaan. Peralihan ini menciptakan pergeseran dari sistem ekonomi berbasis partisipasi masyarakat menuju sistem yang lebih tertutup dan eksklusif, mempersempit ruang ekonomi warga dan menimbulkan kesenjangan dalam distribusi manfaat wisata. Secara keseluruhan, peralihan pengelolaan telah mengubah kawasan wisata dari yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang sosial bersama dan penopang ekonomi masyarakat menjadi entitas yang lebih terpisah dari kehidupan komunitas lokal.

Pembahasan

Peralihan pengelolaan Desa Wisata Ketapang Urban Aquaculture dari pemerintah desa dan masyarakat kepada BUMD PT. Mitra Kerta Raharja telah menciptakan transformasi struktural yang signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah peralihan menunjukkan pergeseran dramatis dari model pengelolaan partisipatif kolaboratif menuju sistem korporatis- birokratis yang berdampak luas terhadap aspek partisipasi, kohesi sosial, peluang ekonomi, hingga keberlangsungan tradisi budaya. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat yang sebelumnya tinggi dalam perencanaan, pembangunan, dan operasional kini menyusut drastis menjadi peran marginal sebagai pedagang yang tidak memiliki kewenangan pengaturan. Kohesi sosial yang sebelumnya kuat melalui gotong royong, aktivitas Karang Taruna, dan festival budaya Nadran kini melemah akibat hilangnya ruang interaksi kolektif. Secara ekonomi, kesempatan usaha yang dahulu luas kini terbatas, dengan pendapatan UMKM anjlok dari Rp300-400 ribu per hari menjadi kurang dari Rp100 ribu, bahkan banyak yang

terpaksa menghentikan usaha. Lapangan kerja menyempit dari 37 pegawai lokal menjadi hanya 20 orang dengan jam kerja yang dipangkas. Perubahan tarif dari murah atau gratis menjadi mahal tanpa peningkatan fasilitas menyebabkan kunjungan wisatawan menurun drastis, yang pada gilirannya memperparah kondisi ekonomi warga. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah hilangnya tradisi Nadran, festival laut yang sarat makna spiritual dan menjadi identitas budaya pesisir, yang menunjukkan erosi budaya lokal dan melemahnya identitas kolektif masyarakat.

Untuk memahami dinamika perubahan ini secara komprehensif, analisis menggunakan kerangka teori Struktural Fungsional Talcott Parsons melalui skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) menjadi sangat relevan. Kerangka ini memungkinkan penelusuran sistematis terhadap bagaimana perubahan struktur pengelolaan mempengaruhi keberlangsungan sistem sosial masyarakat Desa Ketapang.

1. *Adaptation*

Fungsi adaptasi dalam skema AGIL menekankan kemampuan sistem sosial menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal dan kebutuhan situasional (Parsons, 1951). Peralihan pengelolaan telah menciptakan tekanan bagi masyarakat Desa Ketapang. Sebelumnya, masyarakat dapat dengan bebas mengakses kawasan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan berkontribusi langsung dalam pengelolaan. Namun regulasi baru dari BUMD yang memungut tarif masuk dan memperketat operasional memaksa masyarakat melakukan penyesuaian cepat tanpa dukungan memadai. Dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh pelaku

UMKM menunjukkan bahwa pengunjung berangsur berkurang karena bosan dengan fasilitas stagnan sementara biaya masuk meningkat. Kondisi ini mengindikasikan tekanan ekonomi yang memaksa masyarakat mencari strategi adaptasi baru dalam keterbatasan.

Konsep adaptasi Parsons mengharuskan masyarakat memiliki kapasitas mengatasi tekanan-tekanan baru dari sistem ekonomi atau kebijakan struktural (Sahla et al., 2024). Sebelum peralihan, sistem ekonomi lokal berbasis partisipasi komunitas memberikan fleksibilitas tinggi bagi warga untuk berkreasi dan memperoleh penghasilan. Namun intervensi struktural BUMD terhadap aktivitas ekonomi informal menciptakan ketidakseimbangan distribusi akses dan manfaat (Darmawan et al., 2025). Proses adaptasi berjalan timpang karena tidak semua warga memiliki modal atau kemampuan memenuhi standar baru yang ditetapkan. Warga yang sebelumnya berjualan bebas tanpa retribusi kini harus tunduk pada sistem formal berbiaya tinggi, bahkan tidak semua memperoleh tempat berjualan. Fenomena ini menunjukkan pengelolaan BUMD yang belum optimal karena kurangnya komunikasi dengan masyarakat lokal, sehingga kemampuan beradaptasi melemah tanpa proses transisi yang memfasilitasi transfer informasi dan pelatihan keterampilan (Halawa et al., 2022).

Observasi lapangan memperkuat temuan ini dengan ditemukannya infrastruktur pendukung yang lapuk dan tidak diperbaiki, seperti jembatan kayu penghubung dan fasilitas umum yang

terbengkalai. Kondisi ini menambah beban adaptasi karena masyarakat tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi tetapi juga lingkungan fisik yang tidak mendukung aktivitas wisata. Ketidakmampuan mengelola fungsi adaptasi tercermin dalam tingginya angka PHK terhadap pekerja lokal pasca peralihan. Banyak warga yang sebelumnya menjadi karyawan operasional, petugas kebersihan, dan penjaga tiket diberhentikan dengan alasan penghematan biaya operasional, padahal ketika dikelola pemerintah mereka semua dapat bekerja. Ini menunjukkan adaptasi yang menyentuh aspek psikososial, termasuk kehilangan rasa memiliki dan keterlibatan (Wawancara peneliti, 2025).

Ketidakseimbangan antara tuntutan lingkungan baru dengan kapasitas penyesuaian menghasilkan adaptasi yang parsial dan sporadis. Warga dengan modal lebih mampu menyewa lapak formal atau bermigrasi ke sektor ekonomi lain, sementara lainnya harus menghentikan aktivitas usaha. Penyesuaian yang tidak merata ini justru memperdalam jurang ketimpangan sosial. Sebagai sistem organisme yang paling terdampak dan dituntut merespons perubahan langsung, masyarakat Desa Ketapang tidak memperoleh cukup sumber daya baik informasi, dukungan, maupun fasilitas untuk beradaptasi secara optimal (Sunartiningsih et al., 2020). Perbandingan dengan Program Gerbang Mapan yang sebelumnya berhasil meningkatkan motivasi berwirausaha masyarakat pesisir menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada sejauh

mana struktur sosial memberikan ruang dan dukungan. Ketika struktur menjadi terlalu kaku atau eksklusif, fungsi adaptasi terganggu dan memicu disintegrasi sosial (Royadi & Ma'asan Mayrudin, 2024).

2. Goal Attainment

Fungsi pencapaian tujuan mengacu pada kemampuan sistem sosial merumuskan tujuan bersama dan menetapkan mekanisme pencapaiannya (Talcott Parsons, 1951). Pemerintah Kabupaten Tangerang dan BUMD PT. Mitra Kerta Raharja diharapkan menjadi motor penggerak mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan melalui pengelolaan desa wisata. Namun temuan menunjukkan ketidaksesuaian signifikan antara visi kelembagaan dengan kondisi realitas sosial. Sejak diberlakukannya sistem tiket berbayar, pengunjung mengalami penurunan drastis sehingga pengelola menghadapi kesulitan mencapai target pembangunan. Kondisi ini menandakan kegagalan dalam pencapaian tujuan karena sistem yang dibangun justru menghasilkan dampak sebaliknya terhadap tujuan pariwisata yang inklusif dan berdaya saing.

Fungsi pencapaian tujuan dijalankan oleh sistem kepribadian yang melibatkan individu atau kelompok mendukung dan melaksanakan tujuan sistem secara kolektif. Tujuan dapat berupa peningkatan kesejahteraan, pengembangan infrastruktur wisata, dan pelestarian lingkungan. Namun praktiknya, masyarakat lokal tidak dilibatkan aktif dalam perumusan maupun pelaksanaan tujuan tersebut.

Tidak ada sosialisasi dari pengelola mengenai rencana ke depan, sehingga warga hanya dapat mengikuti aturan tanpa memahami konteks dan arah pengembangan kawasan. Mekanisme pencapaian tujuan tidak dibangun melalui konsensus sosial, melainkan bersifat top-down dan eksklusif. Ketidakhadiran partisipasi masyarakat berisiko menciptakan ketidakharmonisan sistem sosial karena tujuan pengelola yang berorientasi keuntungan ekonomi tidak selaras dengan tujuan masyarakat yang menginginkan aksesibilitas dan pemberdayaan (Hidayah, 2025). Dampaknya terlihat jelas dari penurunan pendapatan UMKM, PHK tenaga kerja lokal, dan berkurangnya semangat terlibat dalam kegiatan desa wisata. Dominasi aktor eksternal BUMD mengesampingkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah daerah memang telah memberikan kerangka kerja bagi BUMD melalui RPJMD Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2022, namun implementasi di lapangan tidak mampu mengoperasionalkan tujuan menjadi aksi nyata. Ambiguitas dalam struktur tujuan ini dapat dipahami sebagai kegagalan artikulasi tujuan yang menyebabkan sistem kepribadian masyarakat menjadi teralienasi.

Kondisi diperparah oleh tidak tercapainya target pembangunan fisik seperti gondola, jalur sepeda, homestay, dan laboratorium mangrove yang direncanakan PT. MKR. Hingga penelitian dilakukan, tidak satupun fasilitas tersebut direalisasikan karena faktor pendanaan dan kurangnya dukungan publik. Rencana

pembangunan hanya menjadi wacana tanpa progres nyata, sementara kondisi fasilitas yang ada justru semakin memburuk. Ketidaktercapaian ini menjadi indikator utama kegagalan sistem dalam mencapai targetnya. Dalam ranah sosial, masyarakat mengeluhkan kurangnya lapangan kerja baru, terbatasnya akses modal UMKM, dan hilangnya semangat kolektif menjaga kawasan wisata. Warga menjadi lebih pasif karena merasa tidak memiliki peran lagi di kawasan wisata dimana semua aspek pengelolaan dilakukan pihak luar. Ini merupakan bentuk disintegrasi antara sistem kepribadian masyarakat dengan struktur tujuan kolektif (Arief Setiawan Adam & Indrayani Hamin, 2024). Tujuan sosial yang seharusnya meningkatkan kohesi dan partisipasi justru berubah menjadi sumber alienasi. Fungsi goal attainment hanya berjalan di level administratif, sementara secara sosial dan praktikal belum memberikan dampak signifikan. Ketika tujuan sistem tidak diinternalisasi oleh individu dan kelompok, sistem mengalami disorientasi dan kehilangan legitimasi. Penurunan jumlah pengunjung, kekecewaan masyarakat, serta kemandekan program pembangunan merupakan wujud tidak tercapainya fungsi pencapaian tujuan.

3. Integration

Fungsi integrasi mengacu pada kemampuan sistem sosial menjaga solidaritas, harmoni, dan keterikatan antara unit-unit sosial berbeda (Parsons, 1951). Dalam pengelolaan Desa Wisata Ketapang yang melibatkan berbagai aktor dari pemerintah daerah, BUMD, pelaku UMKM lokal, hingga masyarakat

sekitar, integrasi menjadi aspek krusial. Namun peralihan pengelolaan justru memunculkan disintegrasi sosial akibat minimnya komunikasi, keterlibatan, dan koordinasi antarpihak. Warga yang dahulu dapat berdagang tanpa dipungut biaya kini bahkan dilarang berdagang di pinggiran kawasan oleh pengelola. Pernyataan ini mencerminkan terputusnya jembatan komunikasi yang seharusnya menjadi pengikat sosial antar elemen masyarakat.

Fungsi integrasi dijalankan oleh sistem budaya yang menciptakan norma, nilai, dan konsensus di antara anggota masyarakat. Ketika norma dan nilai kolektif tidak dikelola baik, masyarakat mengalami konflik peran dan identitas (Nawing et al., 2023). Di Desa Ketapang, nilai gotong royong dan partisipasi yang selama ini menjadi fondasi masyarakat lokal tergeser oleh mekanisme pasar yang dibawa pengelola baru. Proses ini menyebabkan fragmentasi sosial dimana warga tidak lagi merasa sebagai bagian dari sistem, melainkan sebagai pihak luar yang teralienasi dari ruang hidupnya sendiri. Kondisi alienasi semakin terasa ketika warga hanya dapat berada di rumah karena tidak ada lagi pekerjaan di kawasan wisata, menunjukkan gejala erosi integrasi sosial akibat ketimpangan distribusi kekuasaan dan akses.

Tidak adanya forum komunikasi dan mediasi menjadi penyebab utama melemahnya integrasi. Ketika warga tidak merasa didengar, kepercayaan sosial menurun dan memicu resistensi. Hal tersebut tercermin dalam meningkatnya sikap apatis terhadap kegiatan desa wisata serta penurunan partisipasi dalam program lingkungan.

Warga yang dahulu membersihkan lokasi wisata kini bahkan tidak dapat masuk kawasan tanpa membayar tiket terlebih dahulu. Integrasi sosial dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas sangat bergantung pada wadah partisipasi bersama. Di Ketapang, keberadaan komunitas masyarakat yang sebelumnya menjadi motor integrasi sosial kini meredup. Tidak ada lagi kegiatan bersama warga dalam pengelolaan atau penyelenggaraan aktivitas wisata, membuktikan bahwa integrasi tidak dapat dipaksakan melalui struktur formal semata tetapi harus dibangun melalui relasi sosial yang dialogis dan inklusif (Delfiana Da Costa & Ni Made Gandhi Sanjiwani, 2025).

Kondisi infrastruktur sosial yang melemah memperparah disintegrasi. Ketika tidak ada forum pertemuan rutin, papan informasi, atau saluran aspirasi, masyarakat merasa terpinggirkan. Sistem sosial yang sehat membutuhkan alat integratif seperti komunikasi, simbol, dan institusi normatif yang menjembatani kepentingan berbeda. Ketiadaan alat tersebut menyebabkan warga beroperasi dalam ruang penuh ketidakpastian sehingga hubungan sosial menjadi rapuh. Banyak warga tidak mengetahui siapa yang mengelola kawasan atau kemana menyampaikan aspirasi. Integrasi juga menyangkut aspek budaya, dimana aktivitas wisata sebelumnya sering diiringi kegiatan seni lokal dan tradisi pesisir. Namun kini aktivitas tersebut semakin jarang dilakukan karena orientasi pengelolaan lebih fokus pada pendapatan tiket dan sewa lokasi. Dampaknya adalah berkurangnya ruang ekspresi budaya

lokal yang memperkuat identitas dan kohesi sosial warga. Warga tidak lagi melihat kawasan wisata sebagai milik bersama, melainkan sebagai area komersial yang dikendalikan pihak luar. Kegagalan integrasi dapat menyebabkan deviasi sosial dan konflik horizontal. Masyarakat yang tidak merasa terlibat dalam sistem akan mencari cara sendiri mempertahankan eksistensi, bahkan dengan cara kontraproduktif. Di Ketapang, beberapa warga mencoba tetap berdagang di area luar pagar atau menghindari petugas untuk tetap memanfaatkan ruang publik yang dulunya terbuka. Ini menandakan pergeseran norma dan nilai akibat ketidakhadiran struktur integratif. Ketimpangan komunikasi, eksklusi sosial, dan berkurangnya ruang partisipasi menyebabkan kohesi sosial menurun. Tanpa integrasi yang kuat, tujuan pembangunan berkelanjutan sulit tercapai karena masyarakat sebagai subjek utama pembangunan merasa tidak menjadi bagian dari sistem.

4. *Latency*

Fungsi latensi atau pemeliharaan pola dalam skema AGIL berkaitan dengan kemampuan sistem sosial dalam mempertahankan nilai-nilai, norma, dan motivasi yang menjadi basis identitas kolektif masyarakat (Parsons, 1951). Fungsi ini berjalan melalui proses sosialisasi, internalisasi nilai, dan reproduksi budaya yang menjaga kontinuitas sistem sosial lintas generasi. Dalam konteks Desa Wisata Ketapang, fungsi latensi sebelumnya berjalan melalui tradisi gotong royong, festival budaya Nadran, dan aktivitas kolektif yang melibatkan seluruh elemen

masyarakat dari generasi tua hingga pemuda. Namun peralihan pengelolaan telah mengakibatkan erosi signifikan terhadap nilai-nilai dan pola budaya yang selama ini menjadi perekat sosial masyarakat pesisir.

Hilangnya festival Nadran sebagai tradisi khas yang sarat makna spiritual dan ungkapan syukur masyarakat pesisir merupakan indikator paling nyata dari gagalnya fungsi latensi. Tradisi yang sebelumnya rutin dilaksanakan dan memperkuat solidaritas sosial serta identitas budaya pesisir kini tidak lagi dilaksanakan setelah peralihan. Warga hanya menjadi penonton acara yang diselenggarakan pengelola, bukan lagi aktor utama yang merayakan identitas budaya mereka sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang untuk ekspresi budaya lokal dan reproduksi nilai-nilai tradisional telah tersumbat oleh orientasi komersial pengelolaan baru. Ketika tradisi yang seharusnya memperkuat kebanggaan kolektif hilang, maka sistem kehilangan mekanisme utama dalam memelihara pola budaya dan transmisi nilai antar generasi.

Fungsi latensi juga tercermin dalam peran Karang Taruna yang sebelumnya aktif dalam gerakan menanam mangrove dan berbagai kegiatan sosial. Organisasi pemuda ini menjadi wadah sosialisasi nilai-nilai kepedulian lingkungan dan tanggung jawab sosial bagi generasi muda. Namun setelah peralihan pengelolaan, Karang Taruna kehilangan ruang aktualisasi di kawasan wisata. Pemuda tidak lagi memiliki wadah untuk mengekspresikan energi kolektif mereka dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan. Hilangnya

peran pemuda ini berdampak pada terputusnya rantai transmisi nilai dari generasi tua kepada generasi muda, yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan hilangnya identitas kolektif masyarakat pesisir.

Pergeseran dari rasa memiliki kolektif menjadi sikap individualistik juga mencerminkan melemahnya fungsi latensi. Warga yang sebelumnya bangga membangun kawasan wisata bersama dan ikut menjaga kebersihan serta fasilitas kini merasa tanggung jawab tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada PT. Perubahan orientasi ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar motivasi kolektif telah melemah. Sistem sosial yang sehat membutuhkan pola pemeliharaan nilai yang konsisten untuk menjaga motivasi anggota masyarakat dalam berkontribusi terhadap tujuan bersama. Ketika fungsi ini gagal, masyarakat akan kehilangan *sense of belonging* dan komitmen terhadap sistem, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan sistem sosial itu sendiri (Fahri Mawardi et al., 2024). Struktur komunikasi lokal yang melemah juga berdampak pada fungsi latensi. Informasi yang sebelumnya disebarkan melalui RT/RW sehingga warga mengetahui kegiatan dan dapat berpartisipasi kini bersifat eksklusif dan langsung dari PT. Warga sering terlambat mengetahui kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata mereka sendiri. Perubahan pola komunikasi ini tidak hanya mengurangi peran lembaga sosial desa, tetapi juga menghambat proses sosialisasi dan internalisasi nilai nilai baru yang seharusnya

dikomunikasikan secara inklusif. Tanpa komunikasi yang efektif, nilai-nilai dan norma baru tidak dapat diinternalisasi oleh masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan antara nilai yang dianut pengelola dengan nilai yang dipegang masyarakat lokal. Hilangnya ruang publik untuk kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan di kawasan wisata juga menunjukkan erosi fungsi latensi. Fasilitas yang dulunya fleksibel digunakan warga untuk berbagai kegiatan kolektif kini terikat aturan ketat dan memerlukan izin formal dari PT. Pembatasan akses ini mengurangi kesempatan masyarakat untuk melakukan ritual sosial dan budaya yang menjadi mekanisme penting dalam reproduksi nilai dan penguatan identitas kolektif. Ketika ruang untuk ritual bersama hilang, maka proses pemeliharaan pola budaya terganggu dan masyarakat kehilangan sarana untuk mewariskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya.

Dalam perspektif Parsons, fungsi latensi berjalan melalui sistem kultural yang menyediakan legitimasi simbolik dan orientasi nilai bagi anggota masyarakat. Ketika sistem kultural melemah, anggota masyarakat kehilangan pegangan normatif dan motivasi untuk berpartisipasi dalam sistem (Julyati Hisyam et al., 2025). Di Desa Ketapang, melemahnya sistem kultural terlihat dari menurunnya semangat gotong royong, hilangnya tradisi lokal, dan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan kolektif. Masyarakat tidak lagi termotivasi untuk berkontribusi karena merasa nilai-nilai yang mereka anut tidak dihargai dalam

sistem pengelolaan baru. Kondisi ini menciptakan alienasi kultural dimana masyarakat merasa terasing dari identitas dan tradisi mereka sendiri.

Kegagalan fungsi latensi juga berdampak pada lemahnya legitimasi sistem pengelolaan baru di mata masyarakat. Ketika nilai-nilai yang dianut pengelola tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar, masyarakat akan menolak atau bersikap apatis terhadap sistem. Legitimasi tidak dapat dipaksakan melalui otoritas formal semata, tetapi harus dibangun melalui keselarasan nilai dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa legitimasi kultural, sistem pengelolaan akan terus menghadapi resistensi dan kesulitan dalam mencapai tujuan jangka panjang (Bagaskara et al., 2021).

KESIMPULAN

Peralihan pengelolaan Desa Wisata Ketapang Urban Aquaculture dari pemerintah desa kepada BUMD PT. Mitra Kerta Raharja telah membawa transformasi fundamental dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Perubahan struktural ini tidak hanya mengubah sistem administrasi dan operasional kawasan wisata, tetapi juga menciptakan dampak yang signifikan terhadap pola partisipasi, kesejahteraan ekonomi, kohesi sosial, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Sebelum peralihan, masyarakat Desa Ketapang terlibat secara aktif dalam pengelolaan kawasan wisata melalui berbagai aktivitas ekonomi informal, pekerjaan langsung di sektor wisata, serta kegiatan kolektif yang memperkuat solidaritas sosial. Namun,

sistem pengelolaan baru yang lebih berorientasi korporat telah menggeser dinamika tersebut ke arah yang lebih birokratis dan eksklusif.

Analisis menggunakan kerangka teori AGIL Talcott Parsons mengungkapkan bahwa keempat fungsi utama sistem sosial mengalami disfungsi serius pasca peralihan pengelolaan. Dalam aspek adaptasi, masyarakat menghadapi tantangan berat untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru yang ditandai oleh kenaikan biaya masuk kawasan, penurunan drastis jumlah wisatawan, dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga lokal. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan ini menunjukkan lemahnya kapasitas adaptif yang seharusnya didukung oleh mekanisme transisi yang inklusif dan terencana. Dari sisi pencapaian tujuan, meskipun pengelolaan oleh BUMD dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme, pendapatan asli daerah, dan mengurangi pungutan liar, implementasinya justru menimbulkan kontradiksi karena mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan mengakibatkan tujuan kolektif yang seharusnya mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak menjadi tidak tercapai secara menyeluruh.

Fungsi integrasi mengalami pelemahan signifikan akibat minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengelola BUMD, dan masyarakat lokal. Ketidakharmonisan ini termanifestasi dalam menurunnya dukungan masyarakat, munculnya

ketidakpuasan terhadap kebijakan baru, dan memudarnya semangat kolaboratif yang sebelumnya menjadi kekuatan pengelolaan berbasis masyarakat. Lebih jauh lagi, fungsi latensi yang berkaitan dengan pelestarian pola dan nilai sosial mengalami erosi serius. Nilai-nilai lokal seperti partisipasi aktif, gotong royong, dan pelestarian budaya tradisional mulai tergerus seiring dengan berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan hilangnya kontrol terhadap sumber daya lokal. Dampaknya adalah pudarnya motivasi kolektif dan melemahnya nilai-nilai budaya yang dahulu menjadi pengikat identitas sosial masyarakat Desa Ketapang.

Secara keseluruhan, peralihan dari sistem pengelolaan berbasis masyarakat ke sistem berbasis korporat melalui BUMD telah menciptakan tantangan struktural yang serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengelolaan desa wisata yang mengabaikan integrasi sosial dan partisipasi warga berpotensi menyebabkan ketimpangan ekonomi, penurunan kesejahteraan, serta krisis identitas komunitas. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- ArSetiawan Adam, M., & Indrayani Hamin, D. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip, Implementasi, dan Dampak Sosial. *JAMBURA*, 7(2).
<http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>
- Bagaskara, A., Hakiki, K. M., Rohmatika, R. V., Badruzaman, B., & Putra, A. E. (2021). Identitas Kebalian; Rekonstruksi Etnik Bali Dalam Mempertahankan Identitas Pasca Konflik. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 49–74.
<https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.9196>
- Darmawan, D., Riansayah, A., & Ganiadi, M. (2025). Pelaksanaan Ekowisata Mangrove Ketapang Urban Aquaculture Desa Pelaksanaan Ekowisata Mangrove Ketapang Urban Aquaculture Desa Ketapang Kecamatan Mauk. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 8–13.
- Delfiana Da Costa, & Ni Made Gandhi Sanjiwani. (2025). Penerapan Komunikasi Partisipatif Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(2), 206–217.
<https://doi.org/10.56910/gemawisata.v21i2.595>
- Fahri Mawardi, M., Mulyana, A., & Mia Amalia. (2024). PROSIDING MIMBAR JUSTITIA GOTONG ROYONG SEBAGAI FONDASI MORAL BUDAYA: PERSPEKTIF HUKUM DAN

- KEHARMONISAN
SOSIAL. *Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana
Cianjur, 1(1), 207.*
<https://jurnal.unsur.ac.id/pmj/article/view/4220/0>
- Halawa, S., Ndraha, A. B.,
Telaumbanua, Y. A., Jaya
Halawa, S., Ndraha, A.
B., & Amerita
Telaumbanua, Y. (2022).
*DINAMIKA
PERUBAHAN
PROFESIONALISME
PEGAWAI SEBAGAI
BENTUK ADAPTASI
SISTEM KERJA BARU
DI TEMPAT
USAHA DI KOTA
GUNUNGSITOLI (Studi
Perbandingan Sistem
Kerja Antara
Alfamidi/Franchise Mart
dan City Mart/Indomaret)*
*THE DYNAMICS OF
CHANGE IN EMPLOYEE
PROFESSIONALISM AS
A FORM OF
ADAPTATION TO A NEW
WORK SYSTEM IN
BUSINESS LOCATIONS
IN GUNUNGSITOLI
CITY
(Comparative Study of Work
System Between
Alfamidi/Franchise Mart and City
Mart/Indomaret). 10(4), 1525–
1534.*
- Hidayah, S. (2025). Konstruksi
Sosial terhadap Risiko
Lingkungan dan
Implikasinya terhadap
Partisipasi Publik dalam
Perencanaan
Pembangunan
Berkelanjutan. In *Trends
in Applied Sciences,
Social Sciences, and
Education* | (Vol. 3, Issue

1).

- Julyati Hisyam, C., Tuffahati, F.,
Aulia Rahma, I., Fakhria,
I., Ayu Safaatun, M., &
Amaliyah Al-Fauziah, R.
(2025). *Realitas Sosial
Pengangguran Terdidik di
Perkotaan: Studi*

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS

- Pada Lulusan Perguruan Tinggi di Rawamangun, Jakarta Timur.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.15769636>
- Fitriana, S. N. (2023). *Bupati Ungkap Keberhasilan Kelola Pesisir Lewat Tangerang's Initiative* Baca artikel detiknews, "Bupati Ungkap Keberhasilan Kelola Pesisir Lewat Tangerang's Initiative" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6752886/bupati-ungkap-keberhasilan-kelola->. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6752886/bupati-ungkap-keberhasilan-kelola-pesisir-lewat-tangerangs-initiative>
- Musdah, E., & Nurdin, W. N. (2024). *Policy Networks in Community-Based Tourism Management*. 333–350.
- Napilah, N. H. S. N. (2022). Dampak pembangunan Gerbang Mapan pada perilaku sosial masyarakat Desa Ketapang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8800–8810.
- Nawing, K., Nurul Alanur, S., Ali Jennah, M., Kulyawan, R., & Umiyati, T. (2023). *PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL LINTAS BUDAYA PADA MASYARAKAT MULTIKULTUR DI KECAMATAN POSO PESISIR UTARA KABUPATEN POSO* (Vol. 8, Issue 1).
- Nishfatin, N. (2024). Analisis Perkembangan Jumlah Fasilitas Dan Pengunjung Di Ketapang Urban Aquaculture Mauk Tangerang Banten. *Jurnal Perikanan Pantura (JPP)*, 7(1), 477–486.
- Parhad, K. (2020). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislahti. *Journal of Travel Research*, 57(4), 483–494. <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0047287517701858>
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Routledge. https://books.google.co.id/books/about/The_Social_System.html?id=4bKAAA-AAQB-AJ&redir_esc=y
- Pokhrel, S. (2024). Kajian ekowisata mangrove di Desa Ketapang Kecamatan Mauk. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Prabowo, H. (2020). Regional Autonomy Oversight Models in Denmark and Zimbabwe and Alternative Regional Autonomy Oversight Model in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 64–74. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.64-74>
- Puro, S., Nurmawati, B., Maria, K., & Marlin, S. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat dalam Kegiatan Relokasi Permukiman Dampak Program PEMSEA Tahun 2022 di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO)*, 1(2), 48–56.
- Royadi, I. N., & Ma'asan Mayrudin, Y. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Program Gerbang Mapan Di Desa Ketapang Oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang. *Prosiding Mimbar Justitia*, 1(1), 101–116.
- Sahla, H., Harahap, I., & Nawawi, Z. (2024). ., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Analisa Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan dalam Teori Ekonomi. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 173-180. *Journal of Science and Society Research*, 7(1), 173–180 <https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i2.12>.

Sunartiningsih, A., Ardiansyah, A. N.,
Prihatin, D. A., Astuti, E. Z.
L., Prabaningrum, G.,
Suyatna, J., Suharko,
Margono, S. A., Kusumasari,
B., Damanik, J., Farransahat,
M., Hafida, S. H. N., Pinem,
M. L., & Darajat. (2018).
*Pengembangan Masyarakat
Dalam Perspektif
Pembangunan Sosial dan
Kesejahteraan* (S. Eddyono,
Ed.). CV. Buana Grafika.

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS